

**KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH (BPKD) KOTA LANGSA DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERITAH DAERAH (LKPD)
TAHUN 2022**

TESIS

Oleh

**YUYUN ANGGIA MURNI NAPITUPULU
NPM. 211801042**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 9/7/24

**KINERJA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH (BPKD) KOTA LANGSA DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERITAH DAERAH (LKPD)
TAHUN 2022**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**YUYUN ANGGIA MURNI NAPITUPULU
NPM. 211801042**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen
Nasional di SDN 12 Rantau Selatan

Nama : Yuyun Anggia Murni Napitupulu

Npm : 211801042

MENYETUJUI:

Pembimbing I



Dr. Warjio, M.A

Pembimbing II



Dr. Adam, M.AP

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Budi Hartono, M.Si

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 26 April 2024

Nama : Yuyun Anggia Murni Napitupulu

NPM : 211801042



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Heri Kusmanto, MA

Sekretaris : Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si

Pembimbing I : Dr. Warjio, MA

Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/7/24

HALAMAN PERNYATAAN

Melalui pernyataan ini saya menerangkan bahwa Proposal Tesis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG ASESMEN NASIONAL DI SDN 12 RANTAU SELATAN”** adalah benar tulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara jelas tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar Pustaka.

Medan, April 2024



Handwritten signature of Yuyun Anggia Murni Napitupulu.

Yuyun Anggia Murni Napitupulu
211801042

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuyun Anggia Murni Napitupulu
NPM : 211801042
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan

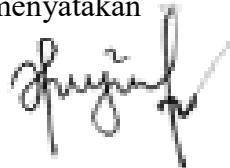
berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Yuyun Anggia Murni Napitupulu

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG ASESMEN NASIONAL DI SDN 12 RANTAU SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU

Nama : Yuyun Anggia Murni Napitupulu
NPM : 211801042
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Warjio, M.A
Pembimbing II : Drrr. Adam, M.AP

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengenai Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan sudah dilaksanakan namun belum optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dan apa saja faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengacu pada teori Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dari segi komunikasi dan sumber daya baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia masih belum maksimal. Dari segi komunikasi, masih ada informasi yang belum tersampaikan kepada orang tua peserta didik, sehingga masih kurang persiapan peserta didik dalam menghadapi asesmen nasional. Dari segi sumberdaya finansial seperti fasilitas disatuan pendidikan masih belum lengkap dan jaringan Wifi yang masih belum lancar sehingga peserta Asesmen Nasional mengalami kendala dalam menyelesaikan. Dari segi sumber daya manusianya peserta didik masih belum paham menggunakan cromebook dikarenakan pendidik khusus komputer tidak ada. Kendala yang dihadapi satuan pendidikan yaitu tidak tersedianya ruangan khusus laboratorium komputer dan jaringan Wifi yang masih kurang lancar.

Kata Kunci : *Implementasi, Asesmen Nasional*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF EDUCATION, CULTURE, RESEARCH AND TECHNOLOGY NUMBER 17 OF 2021 ABOUT THE NATIONAL ASSESSMENT AT SDN 12 RANTAU SELATAN LABUHANBATU DISTRICT

Name : Yuyun Anggia Murni Napitupulu
NPM : 211801042
Study Program : Magister Ilmu Administrasi Publik
Advisor I : Dr. Warjio, M.A
Advisor II : Dr. Adam, M.AP

The implementation of the of the minister of education, culture, research and technology regarding the national assessment at SDN 12 Rantau Selatan is going well but not optimal. The formulation of the problem in this research is how to implement the of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 17 of 2021 concerning the National Assessment at SDN 12 South Rantau, Labuhanbatu Regency and what are the inhibiting factors. The research method used is a qualitative method, and data analysis techniques use descriptive qualitative. Data collection was obtained from observation, interviews and documentation. The research results refer to Edward III's theory with indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the research are that the Implementation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 17 of 2021 concerning the National Assessment at SDN 12 Rantau Selatan Regency Labuhanbatu Regency in terms of communication and resources, both financial resources and human resources, is still not going well. In terms of communication, there is still information that has not been conveyed to the parents of students, so that students are still lacking in preparation for the national assessment. In terms of financial resources, such as facilities in education units that are still incomplete and the Wi-Fi network is still not smooth so that participants in the national assessment experience problems in answering them. In terms of human resources as well so that students still don't understand using cromebooks because there are no educators specializing in computers. Obstacles faced by educational units are the unavailability of a special computer laboratory room and a Wi-Fi network that is still substandard.

Keywords: *Implementation, National Assessment*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Kasih sayangNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional Di SDN 12 Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Tesis ini disusun penulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukung baik secara materil, spiritual, motivasi, dan informasi dari berbagai pihak, dengan segenap kerendahan hati penulis juga menghanturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramlan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Budi Hartono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Warjio, M.A. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Adam, M.AP selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Nadra Ideyani Vita, M.Si selaku narasumber yang banyak memberikan masukan untuk penyempurnaan isi dari tesis ini.
7. Seluruh dosen Pascasarjana Universitas Medan Area, untuk segala bimbingan dan Pelajaran yang telah diberikan

8. Seluruh staf administrasi Pascasarjana Universitas Medan Area untuk semua bantuan dalam mengurus administrasi penulis.
9. Bapak Asrol Aziz Lubis, S.E., M.AP selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
10. Tim Asesmen Nasional Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Labuhanbatu sebagai narasumber penulis.
11. Bapak Bachri Ritonga, S.Pd selaku Kepala Satuan Pendidikan SDN 12 Rantau Selatan.
12. Kepada Proktor Asesmen Nasional dan Tenaga Pendidik di SDN 12 Rantau Selatan tempat penulis meneliti.
13. Kepada Theo Candra Siregar, S.Sos selaku suami penulis yang sudah memberikan motivasi, spiritual dan materil kepada penulis dalam penyelesaian tesis.
14. Kedua orangtua penulis yang sudah banyak memberikan motivasi, spiritual, dan materil kepada penulis
15. Kepada Rotua Veronika Marpaung selaku bestie penulis yang sudah memberikan motivasi, dukungan, spiritual dan pengalaman dalam penyusunan tesis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih perlu disempurnakan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Rantauprapat, Maret 2024



Yuyun Anggia M Napitupulu
NPM: 211801042

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	6
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Implementasi	8
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	9
2.3 Model Implementasi Kebijakan George C.Edward III.....	10
2.4 Faktor-faktor mempengaruhi implementasi kebijakan.....	16
2.5 Permendikbudristek Tentang Asesmen Nasional	17
2.6 Asesmen Nasional	21
2.6.1 Tugas-Tugas Pelaksana Asesmen Nasional.....	22
2.6.2 Instrumen-instrumen dalam Asesmen Nasional.....	28
2.6.3 Tujuan dan manfaat Asesmen Nasional.....	33
2.6.4 Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2022.....	35
2.7 Kerangka Pikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.2 Informan Penelitian	39
3.3 Jenis Penelitian	39
3.4 Data dan Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisa Data	41
3.7 Pemeriksa Keabsahan Data	45
3.8 Definisi Konseptual dan Operasional.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.2 Keterkaitan Peneliti Terdahulu dan Peneliti Sekarang	56
4.3 Hasil Penelitian yang Relevan.....	57

4.4 Pembahasan	61
4.5 Kaitan Dengan Peneliti Sebelumnya	76
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Rekomendasi.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Bentuk-bentuk soal dalam Asesmen Nasional	30
Tabel 2.2 Iklim Belajar dan Iklim Satuan Pendidikan	32
Tabel 2.3 Jadwal Pelaksanaan Pengisian Survei Lingkungan Belajar	35
Tabel 2.4 Jadwal Pelaksanaan Asesmen Nasional	36
Tabel 2.5 Jadwal SD,MI, SDLB, dan yang sederajat Gelombang I	37
Tabel 2.6 Jadwal SD,MI, SDLB, dan yang sederajat Gelombang II	37
Tabel 4.1 Nama Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Pendidik	53
Tabel 4.2 Data Informan Asesmen Nasional TP. 2021/2022	55
Tabel 4.3 Hasil Penelitian yang Relevan	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi George C. Edward III	15
Gambar 2.2 Kerangka pikir	38
Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles	44
Gambar 4.1 SDN 12 Rantau Selatan	51
Gambar 4.2 Struktur organisasi di Satuan Pendidik SDN 12 Rantau Selatan	52



DAFTAR LAMPIRAN

Tabel Pertanyaan buat Informan	82
Dokumentasi	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang Universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun dapat menerima Pendidikan (Syaril & Zen Zellhendri, 2017). Fungsi Pendidikan merupakan proses mengubah tingkah laku seseorang menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri, oleh sebab itu diperlukan Pendidikan yang berkualitas (Sagala, 2012). Pendidikan yang berkualitas adalah Pendidikan yang mampu menjamin peserta didik, memiliki pengetahuan, keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi untuk mencari informasi, serta menggunakannya untuk menghadapi tuntutan abad 21 (Higgins, 2014; Henriksen dkk, 2016, Acedo and Hughes, 2014). Era Globalisasi menuntut peserta didik untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan (Irwanto, Roehati, Widjajanti and Suyanta, 2017). Keterampilan yang perlu dikembangkan oleh peserta didik adalah menghadapi masalah global, meliputi kreativitas dan inovasi, komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah (Irwanto, Rohaeti dan prodjosantoso, 2018; Muhlisin, Susilo, Amin & Rohman, 2016; Sanabria and Jesus, 2017).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Peraturan baru tentang Asesmen Nasional yaitu Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional yang ditetapkan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 12 Juli 2021 di Jakarta

dan ditempatkan pada Berita Negara Nomor 832, agar setiap orang mengetahuinya. Asesmen Nasional yang disingkat dengan AN adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu Pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran diseluruh Satuan Pendidikan, serta dilakukan pemetaan dan perbaikan berkelanjutan sehingga dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil Pelajar Pancasila yang ingin di wujudkan oleh Pendidikan Indonesia merupakan gambaran ideal pelajar untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul (Samekto, 2021). Konsep SDM unggul yang ingin dicapai adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Karena itu pengembangan SDM harus bersifat holistik dan tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja. Hasil asesmen tidak lagi berdampak pada pencapaian proses belajar peserta didik akan tetapi dapat memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi peserta didik atau sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran pada tingkat selanjutnya.

Asesmen Nasional diselenggarakan di seluruh Satuan Pendidikan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Madrasah, dan Program Pendidikan Kesetaraan. Peserta asesmen nasional ditiap satuan pendidikan terdiri dari kepala satuan pendidikan, seluruh tenaga pendidik, dan peserta didik. Sampel peserta didik yang akan mengikuti Asemen Nasional dipilih secara acak oleh Mendikbudristek dengan jumlah 35 orang, dimana 30 peserta inti dan 5 peserta cadangan, sedangkan Kepala sekolah dan guru seluruhnya akan

berpartisipasi. Asesmen Nasional dilaksanakan berbasis komputer yang dapat terhubung langsung dengan internet agar pengelolaan data dan pengelolaan hasil lebih efektif dan efisien. Terdapat 2 (dua) modal dalam pelaksanaan Asesmen Nasional, yakni secara online dan semi-online. Asesmen Nasional menggunakan 3 Instrumen penilaian, yakni: (1) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), (2) Survei Karakter, (3) Survei Lingkungan Belajar. Asesmen Nasional dilaksanakan dengan beberapa Tahap, seperti: Simulasi Asesmen Nasional, Gladi Asesmen Nasional, dan Pelaksanaan Asesmen Nasional pada jenjang Sekolah Dasar. Selain peserta asesmen nasional, ada pelaksana-pelaksana yang berperan dalam pelaksanaan asesmen nasional seperti: pelaksana tingkat Kabupaten (Tim Asesmen Nasional Kabupaten), proktor, teknisi, dan pengawas.

Penelitian sebelumnya (Supriyanto & Rustyawati Dian, 2021) terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan Asesmen Nasional yakni: peserta didik yang tidak memahami Asesmen Nasional masih tinggi. Hal ini disebabkan karena satuan Pendidikan terkait belum melakukan sosialisasi penerapan asesmen nasional yang memiliki tiga instrument penilaian meliputi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survey Belajar, dan Survey Lingkungan Belajar. Hasil penelitian berikutnya (Permata Santy Dinar, 2021) adalah kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, kurang mahirnya peserta didik mengoperasikan komputer, dan adanya tekan mental peserta didik yang diakibatkan oleh kecemasan ujian.

Kabupaten Labuhanbatu terletak di Provinsi Sumatera Utara dengan ibukota Rantauprapat. Kabupaten Labuhanbatu memiliki 9 wilayah Kecamatan, yakni: Bilah Barat, Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Pangkatan, Bilah Hilir,

Panai Hulu, Panai Tengah dan Panai Hilir. Kabupaten Labuhanbatu sebelah utara berbatasan dengan Labuhanbatu Utara, sebelah timur berbatasan dengan provinsi Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Labuhanbatu Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Padang Lawas Utara. Saat ini kabupaten labuhanbatu di pimpin oleh bapak Bupati dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM. Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2022 sebanyak 508.024 jiwa dengan luas wilayah 2.156,02 km². Jumlah Satuan Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu 287 terdiri dari Satuan Pendidikan Negeri 242 dan Satuan Pendidikan Swasta 45. Jumlah peserta didik sekolah dasar pada tahun 2022 sebanyak 52.890 jiwa. Kecamatan Rantau selatan memiliki 22 satuan Pendidikan yang terdiri dari 19 Satuan Pendidikan Negeri dan 3 Satuan Pendidikan Swasta. Jumlah peserta didik di kecamatan rantau selatan sebanyak 5.972 jiwa. Satuan Pendidikan Negeri 12 Rantau Selatan terletak di jalan H. Iwan Matsum, Ujung Bandar. Saat ini Satuan Pendidikan Negeri 12 Rantau Selatan dipimpin oleh bapak Bachri Ritonga. jumlah pendidik dan tenaga pendidik di satuan pendidikan negeri 12 rantau selatan 18 orang, dan jumlah peserta didik seluruhnya 390 orang.

Tahun 2021 Kabupaten Labuhanbatu untuk pertama kali melaksanakan Asesmen Nasional. Masalah yang didapat pada saat pelaksanaan Asesmen Nasional pada tahun 2021 di Kabupaten Labuhanbatu adalah kurangnya Komunikasi dari pihak pelaksana Asesmen Nasional, sumber daya seperti kesadaran/keikutsertaan dari Kepala Satuan Pendidik dan pendidik, Sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti Jaringan Internet dan laptop, serta peserta didik yang belum bisa membaca dengan lancar, disposisi atau karakteristik dari

pihak-pihak yang terkait mengenai Asesmen Nasional, dan Struktur Birokrasi yang kurang berjalan dengan optimal. Berdasarkan data diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Permasalahan mutu pendidikan di Indonesia rendah
2. Membentuk karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai pancasila
3. Program asesmen nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan
4. Instrumen penilaian yang ada pada pertanyaan di asesmen nasional
5. Satuan pendidikan yang mengikuti asesmen nasional.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam penelitian ini dan mengingat keterbatasan kemampuan, materi dan waktu yang tersedia, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan asesmen nasional di satuan pendidikan
2. Instrumen penilaian yang ada pada pertanyaan asesmen nasional
3. Tujuan diadakan asesmen nasional

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas maka, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apa saja faktor dan penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbaru.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam Implementasi Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan Implementasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional Khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan atau referensi yang berguna untuk melakukan pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi

Konsep implementasi semakin banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Menurut Akib Haedar Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan.

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”. Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-

tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi menurut Mulyasa (2014) adalah proses penerapan ide-ide, konsep, kebijakan, atau Inovasi dalam suatu Tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap terhadap pelaku-pelaku pada objek yang dikenai proses Implementasi ini. Implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum atau didesaian untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, (Nurdin dan Usman,2002). Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan ada dua pendekatan dalam pendekatan dalam implementasi kebijakan yakni pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* implementasi kebijakan yang dilakukan ternetralisir dan dimulai dari actor-aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Salah satu ilmuwan yang menganut dan aliran *top down* adalah George C. Edward III.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Leo Agustino, 2021:8) mendefinisikan Implementasikan Kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. Menurut Wahab (2002:59) bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Tujuan kebijakan adalah aspek penting dalam proses implementasi untuk menjadi sasaran yang hendak dituju dan juga untuk mencapai tujuan.

Dari pengertian di atas makna implementasi ialah suatu kebijakan ataupun penerapan, berupa aktivitas dan tindakan untuk memberikan dampak positif yang meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap pasti. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Riset, Kebudayaan dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.

2.3 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi dari George C. Edward III ini disebut *Direct and Indirect impact on implementation*. Model ini merupakan salah satu dari model implementasi kebijakan publik yang mengungkapkan bahwa terdapat empat

variabel yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi dan struktur birokrasi.

Keempat variabel yang menggambarkan tentang implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Edward III dalam Riant Nugroho, menjelaskan bahwa komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*Policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) yang nantinya informasi tersebut akan disampaikan ke kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran mengetahui apa yang harus dilakukan dan memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah dan kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi kebijakan mencakup tiga indikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Transmisi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementers*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Transmisi juga merupakan penyampaian informasi asesmen nasional yang terstruktur dari pemangku kebijakan sampai pada pelaksanaan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Sering kali yang terjadi dalam

penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi). Hal tersebut terjadi karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

b. Kejelasan

Kejelasan, informasi yang disampaikan kepada penerima harus dengan jelas agar menghasilkan implementasi kebijakan yang baik. Apabila informasi yang disampaikan masih bersifat global, umum, dan belum terperinci akan mengakibatkan disparitas informasi. Disparitas informasi dalam komunikasi dapat menyebabkan informasi yang disampaikan bersifat ambigu atau membingungkan. Ketidajelasan komunikasi disebabkan karena tidak di antisipasinya perubahan (*Unanticipated Change*), Perubahan yang benar (*True Intension*), pengurangan diskresi (*Reducing Disreation*), keputusan pengadilan yang ambisius (*ambiguous court decision*), dan nilai fleksibilitas (*value of flexibility*)(Edward III, 1980:30-41).

c. Konsistensi

Konsistensi adalah kesinambungan, kejelasan, kesesuaian dan keselarasan mengenai informasi yang disampaikan baik dari segi waktu dan penyampaian informasi oleh implementor. Apabila informasi yang disampaikan tidak konsistensi maka mengakibatkan perubahan kebijakan.

2. Sumber daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah „Sumber daya“. Menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:138), dalam mengimplementasikan kebijakan, indicator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a) Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena jumlah staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya dalam melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan tersebut.

b) Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c) Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Efektifitas diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain, efektifitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Menurut Edward III (Widodo, 2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi: sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

3. Sikap atau disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016 :139) adalah: Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana suatu kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Menurut Edward III (Agustino, 2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan Birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat- pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada

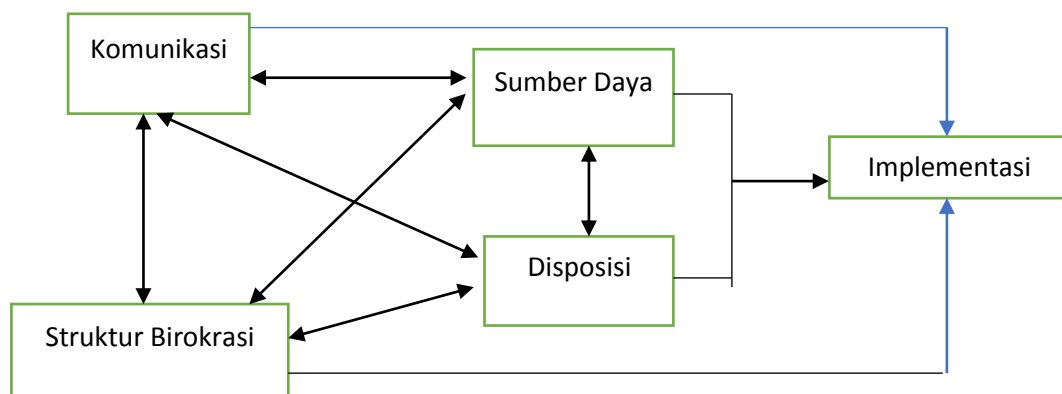
kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat,

- b. Insentif merupakan salah satu Teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

4. Struktur birokrasi

Variabel keempat, menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:140) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Agar dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah: (i) Membuat Standar Operating Procedures (SOP) yang lebih feksibel. (ii) Melaksanakan Fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Gambar 2.1 Model Implementasi George C. Edward III



Berdasarkan urian diatas tentang model implementasi kebijakan, peneliti akan menganalisis Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional, dengan menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Model ini memiliki keunggulan yakni memiliki variabel Komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi dan struktur birokrasi yang nantinya akan mendukung peneliti dalam menganalisis.

2.4 Faktor-Faktor Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Untuk mengkaji lebih baik suatu Implementasi Kebijakan Publik maka perlu diketahui Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Studi implementasi kebijakan yang secara sederhana didefinisikan sebagai proses penerjemahan kebijakan menjadi sebuah tindakan tidak muncul dalam waktu yang singkat (H. Pulzl dan O. Treib, 2007). Suatu argumen memiliki perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan dan bahwa proses implementasi itu akan di pengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang terjadi cenderung sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan yang menjalankan program dilapangan relative tinggi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang bersifat desentralistis, menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Subarsono 2005:101). Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan *sociocultural* serta keterlibatan penerima program;

2. Hubungan antar organisasi implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Maka diperlukan koordinasi dan Kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program;
3. Sumberdaya, organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*);
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah memiliki cakupan struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah pengaruh suatu implementasi sehingga akan menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yang membuat program tersebut mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.

2.5 Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 mengenai Asesmen Nasional. (Festiyed, dkk) Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 pasal 12 maka diterbitkanlah Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen

Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 030/H/PG.00/2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Tahun 2021, Peraturan ini merupakan petunjuk teknis mengenai persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil Asesmen Nasional yang dituangkan lebih detail dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS).

Permendikbudristek Nomor 17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional dibentuk berdasarkan pada (Festiyed, dkk):

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7 ayat 3
- b) UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, ada dua pasal dalam UU Sisdiknas yang menjadi landasan Asesmen Nasional yaitu:
 - i) Pasal 46 (3): Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. Asesmen Nasional; dan b. Analisis data satuan Pendidikan, pendidik, tenaga pendidik, dan Pemerintah Daerah.
 - ii) Pasal 46 (4): Asesmen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengukur; dst Pasal 46 (5): Asesmen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada; dst
 - iii) Pasal 57 yang memuat 2 ayat sebagai berikut:
 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, Lembaga, dan program Pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis Pendidikan.

3. 59 ayat 1 yang berbunyi: ” Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan valuasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis Pendidikan.”
- c) Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) terdapat Bab V tentang Evaluasi, Evaluasi menurut PP 57/2021 meliputi: a) evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan b) evaluasi sistem Pendidikan.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran);
- e) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- f) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);

- g) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
- h) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

2.6 Asesmen Nasional

Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan Pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar seperti Literasi, Numerasi, dan karakter serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim Satuan Pendidikan yang mendukung pembelajaran.

Asesmen Nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu Pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar, yang akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen Nasional menghasilkan informasi untuk memantau:

- a. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan
- b. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem Pendidikan (misalnya kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dalam satuan Pendidikan, kesenjangan antara satuan Pendidikan negeri dan swasta di suatu wilayah, kesenjangan antar daerah, ataupun kesenjangan antar kelompok berdasarkan atribut tertentu).

Dalam pelaksanaan Asesmen Nasional agar berjalan dengan baik maka perlu bantuan dari berbagai pihak pelaksana Asesmen Nasional seperti, Tim Teknis ANBK, Proktor, Teknisi, dan pengawas. Pelaksana Asesmen Nasional adalah Lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan teknis Asesmen Nasional pada tingkat pusat provinsi, kabupaten/kota, satuan pendidikan dan sekolah Indonesia di luar negeri. Tim Teknis ANBK adalah petugas di provinsi dan kabupaten/kota yang diberi kewenangan sebagai petugas

teknis dalam melakukan verifikasi dan pendampingan satuan pendidikan sebagai pelaksana Asesmen Nasional. Proktor adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis aplikasi pelaksanaan Asesmen Nasional di ruang asesmen. Teknisi adalah petugas pengelola sarana komputer dan jaringan di Satuan Pendidikan. Pengawasan adalah pendidik/tenaga kependidikan yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan Asesmen Nasional di ruang Asesmen di Satuan Pendidikan.

2.6.1 Tugas-Tugas Pelaksana Asesmen Nasional

Berdasarkan surat kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 013/H/PG.00/2022 tentang Prosedur Operasional Standar penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2022 maka Pelaksana Asesmen Nasional memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan Kabupaten

1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan teknis AN ke satuan pendidikan di wilayahnya;
2. Melakukan koordinasi pendataan, persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut AN di wilayahnya Bersama dengan dinas pendidikan provinsi dan satuan pendidikan;
3. Memastikan ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di wilayahnya sesuai kewenangannya;
4. Mendata dan memverifikasi satuan pendidikan pelaksana (mandiri/menumpang dan daring/semidaring) berdasarkan

infrastruktur yang dimiliki setiap satuan pendidikan sesuai kewenangannya;

5. Menetapkan satuan pendidikan pelaksanaan AN dan satuan pendidikan yang menumpang ke satuan pendidikan lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan jarak dan lokasi satuan pendidikan yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksanaan AN.
6. Melakukan pelatihan tim teknis kabupaten dan satuan pendidikan diwilayahnya;
7. Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan listrik dan internet pada saat persiapan dan pelaksanaan AN;
8. Menetapkan pendidik sebagai pengawas pelaksanaan AN di satuan pendidikan secara silang;
9. Melakukan pendampingan dalam persiapan dan pelaksanaan AN;
10. Menyelesaikan permasalahan teknis dari satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan menggunakan sistem aplikasi AN;
11. Meneruskan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan kepada tim teknis provinsi;
12. Melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan AN di wilayahnya sesuai dengan POS AN;
13. Memastikan pelaksanaan AN di satuan pendidikan berjalan sesuai dengan protocol Kesehatan yang sudah ditetapkan;

14. Mengeluarkan ketentuan untuk memastikan kewajaran biaya dalam penerapan prinsip berbagai sumber daya antara satuan pendidikan yang menumpang dan satuan pendidikan yang ditumpangi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
15. Melakukan desminisasi hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya;
16. Menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil AN sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di wilayahnya;
17. Melakukan pendampingan tindak lanjut hasil AN terhadap satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
18. Melaporkan hasil AN kepada kepala daerah masing-masing dan
19. Melaporkan hasil pelaksanaan AN tingkat kabupaten untuk disampaikan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah.

b. Pelaksana Tingkat satuan Pendidikan

Pelaksana asesmen nasional tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan asesmen nasional tingkat satuan pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada pendidik, peserta didik, orangtua atau wali peserta didik, dan masyarakat lainnya tentang kebijakan AN dan teknis pelaksanaan AN;
- 2) Merencanakan pelaksanaan AN di satuan pendidikan masing-masing;

- 3) Melakukan simulasi/uji coba pelaksanaan AN sesuai jadwal yang ditetapkan pelaksana tingkat pusat;
- 4) Menetapkan tempat dan/atau ruang asesmen di lokasi satuan pendidikan pelaksana atau tempat lain yang memenuhi persyaratan sarana dan prasarana serta persyaratan lain untuk pelaksanaan AN dengan mempertimpangkan protokol Kesehatan;
- 5) Mengusulkan jumlah sesi perhari kepada dinas pendidikan kabupaten atau provinsi;
- 6) Mengikuti simulasi AN bagi satuan pendidikan dengan status mandiri sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 7) Mengikuti gladi bersih AN dan dapat mengikutsertakan peserta didik yang terpilih sebagai sampel sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 8) Memastikan peserta didik yang mengikuti AN merupakan peserta yang telah ditetapkan oleh kementerian;
- 9) Memastikan peserta AN hadir tepat waktu serta mengikuti seluruh jadwal pelaksanaan AN;
- 10) Menyampaikan Informasi tentang keikutsertaan peserta didik dalam AN kepada orangtua/wali peserta didik;
- 11) Mengatur proses kegiatan belajar mengajar pada saat pelaksanaan AN untuk peserta didik yang tidak menjadi sampel AN;
- 12) Melakukan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan jika peserta utama berhalangan mengikuti asesmen, jumlah

maksimal peserta AN utama yang dapat digantikan adalah sejumlah peserta cadangan (5 Orang), selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelaksanaan AN pada sesi I di hari pertama;

- 13) Menyiapkan peserta didik yang terpilih untuk mengikuti seluruh pelaksanaan AN selama dua hari;
- 14) Memastikan seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar secara mandiri sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- 15) Menetapkan proktor dan teknisi serta memastikan telah mengikuti pelatihan;
- 16) Menyiapkan serta membiayai perpindahan peserta AN bagi peserta AN yang menumpang ke Satuan pendidikan lain;
- 17) Membuat berita acara pelaksanaan AN di satuan pendidikan dan menjamin keamanan serta ketertiban pelaksanaan AN;
- 18) Membiayai persiapan dan pelaksanaan AN di satuan pendidikan;
- 19) Menyampaikan laporan pelaksanaan AN kepada pelaksana tingkat kabupaten.

c. Tugas Pengawas

- 1) Memastikan penerapan protokol Kesehatan selama pelaksanaan AN dalam masa pandemi;
- 2) Memastikan peserta AN menempati tempat yang ditentukan;
- 3) Memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar dan disetujui oleh proktor;

- 4) Membacakan tata tertib pelaksanaan AN;
- 5) Memandu pengisian instrument karakter dan survei lingkungan belajar;
- 6) Menjelaskan istilah yang tidak dipahami oleh peserta pada survei karakter dan survei lingkungan belajar merujuk pada daftar istilah yang disiapkan;
- 7) Memastikan peserta AN melakukan Latihan menjawab soal;
- 8) Membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke pelaksanaan tingkat satuan pendidikan.

d. Tugas Proktor

- 1) Mengunduh aplikasi ANBK pada laman yang ditentukan sebelum pelaksanaan AN;
- 2) Melakukan instalasi aplikasi ANBK pada komputer proktor dan komputer klien untuk digunakan pada saat AN;
- 3) Melakukan *login* ke dalam laman ANBK untuk pengelolaan data peserta AN;
- 4) Memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar;
- 5) Melakukan sinkronisasi apabila menggunakan moda semidaring sebelum pelaksanaan AN;
- 6) Melakukan pengaturan sesi AN bagi semua peserta melalui aplikasi ANBK;
- 7) Mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan POS dalam berita acara pelaksanaana;

- 8) Membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke pelaksana tingkat satuan pendidikan yang sudah ditandatangani proktor dan pengawas.

e. Tugas teknis

- 1) Menyiapkan sarana prasarana komputer yang akan digunakan untuk AN;
- 2) Menyiapkan aplikasi ANBK pada komputer yang akan digunakan untuk asesmen; dan
- 3) Melakukan perbaikan/penggantian alat yang mengalami kerusakan saat Asesmen Nasional.

2.6.2 Instrumen-instrumen dalam Asesmen Nasional

Asesmen Nasional dilaksanakan dengan 3 instrumen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Dari ketiga instrument tersebut diharapkan dalam pengukuran kualitas Pendidikan di Indonesia dapat di implementasikan dengan lengkap dan utuh:

1. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) tersusun atas dua aspek penting yakni, kemampuan literasi dan numerasi. Literasi adalah kemampuan dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan mereflesikan berbagai jenis teks untuk memecahkan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai bagian dari warga negara Indonesia dan dunia, agar dapat berperan aktif di kehidupan masyarakat (Ridwan Abdullah). Literasi juga dapat dimaknai sebagai tata perilaku yang berkenaan dengan jiwa terampil dalam memahami dan

menggunakan sumber data atau informasi cetak noncetak yang terdapat di lingkungan sekitar untuk dapat memperoleh tambahan pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki. Pemaknaan ini senada dengan pemaknaan yang diutarakan oleh Nicolas Jonas sebagai berikut;

Literacy is defined as a particular capacity and mode of behaviour, the ability to understand and employ printed information in daily activities, at home, at work, and in the community to achieve one's goals and to develop one's knowledge and potential.

Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dalam upaya menyelesaikan masalah keseharian pada bermacam jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai Warga Negara Indonesia dan dunia. Singkatnya, numerasi merupakan kemampuan menerapkan pengetahuan matematika di kehidupan sehari-hari. Numerasi sebagaimana yang diutarakan oleh Alberta Government memiliki tiga aspek, yakni: keterampilan dan pengetahuan matematika, pemahaman situasi dan kondisi, serta kepercayaan diri. Laporan dari bank dunia mengenai kemampuan membaca pada tahun 2020-2021 kemampuan membaca peserta didik Indonesia menurun karena pandemic Covid-19.

Dalam aplikasi Instrumen AKM ke dalam soal-soal Asesmen Nasional terdapat beberapa bentuk. Kelima bentuk itu dapat di jelaskan pada tabel dibawah ini (Alfari Sabrina).

Tabel 2.1
Bentuk-bentuk soal dalam Asesmen Nasional

No	Bentuk Soal	Keterangan
1	Pilihan ganda	Memilih salah satu jawaban benar dari setiap soal
2	Pilihan ganda kompleks	Memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal
3	Menjodohkan	Menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya.
4	Isian singkat	Menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban lainnya
5	Uraian	Menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawaban.

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum yang penting adalah aspek nilai tidak menjadi patokan baku dimana hal ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat 1, yang menerangkan bahwa bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau dalam bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) memiliki harapan yang besar, berdasarkan Permendikbud tersebut diharapkan guru dapat mengkreasikan suasana belajar yang lebih menyenangkan, luwes, dan dapat menumbuh kembangkan bakat atau kemampuan yang dimiliki para siswa:

2. Survei Karakter

Survei karakter digunakan untuk mengetahui bagaimana karakter peserta didik disekolah. Menteri Pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim memberi contoh jika survei karakter akan menilai bagaimana implementasi gotong royong disekolah, bagaimana level toleransi yang ada, apakah well-being atau kebahagiaan peserta didik telah tercapai dan tidak ada lagi tindakan perundungan (Bullying). Survei karakter bukan menjadi kegiatan tambahan yang bersifat opsional.

Dalam sebuah artikel disebutkan bahwa Survei Karakter ini memiliki beragam manfaat terutama bagi peserta didik agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses pembentukan karakter sosial. Manfaat-manfaat tersebut bagaimana telah disebutkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem A. Makarim sebagai berikut:

- a. Dengan survei karakter maka akan dapat mengetahui kondisi ekosistem (hubungan timbal balik) disebuah sekolah/madrasah sebagai tempat belajar para peserta didik;
- f. Dengan Survei Karakter maka akan dapat diketahui sejauh mana penerapan asas-asas Pancasila dapat dirasakan dan diamalkan oleh seluruh warga sekolah /madrasah;
- g. Dengan Survei Karakter maka akan dapat mengetahui apakah level toleransi telah berjalan dengan baik atau sebaliknya;
- h. Dengan Survei Karakter maka akan dapat diketahui tingkat kebahagiaan peserta didik;

- i. Dengan Survei Karakter maka akan dapat mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi di kalangan peserta didik, seperti kasus Bullying (Perundungan).

Hasil survey ini tidak digunakan untuk menilai peserta didik sebagai individu, tetapi untuk menilai keberhasilan sekolah dalam pengembangan karakter. Survey karakter yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Survei karakter dilakukan bukan dalam bentuk tes yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Para peserta didik menjawab sejumlah pertanyaan yang sifatnya personal, terkait opini peserta didik mengenai topik seperti gotong royong, bhinneka Tunggal Ika.

3. Survei Lingkungan Belajar

Survei Lingkungan Belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat Satuan Pendidikan. Survei Lingkungan Belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim satuan pendidikan yang menunjang pembelajaran. Aspek-aspek yang dilihat pada Survei Lingkungan Belajar adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Iklim Belajar dan Iklim Satuan Pendidikan

No	Iklim Belajar	Aspek
1	Iklim Keamanan Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan dan well being murid - Sikap dan keyakinan guru - Kebijakan dan program sekolah
2.	Iklim Kebhinekaan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Praktik multikultural dikelas - Sikap dan keyakinan guru/kepala sekolah - Kebijakan dan program sekolah

3.	Indeks Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan orang tua - Profesi orang tua - Fasilitas belajar di rumah
4.	Kualitas Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen kelas - Dukungan afektif - Aktivitas kognitif
5.	Pengembangan Guru	<ul style="list-style-type: none"> - Refleksi dan perbaikan pembelajaran - Dukungan untuk refleksi guru

Survei lingkungan belajar dapat menjadi refleksi bagi guru dan menjadi tolak ukur perbaikan pembelajaran dalam pengajaran serta sebagai gambaran latar belakang keluarga peserta didik. Maka hasil informasi dari survei ini dapat dimanfaatkan sebagai diagnosis permasalahan dan perencanaan perbaikan oleh guru, kepala sekolah/madrasah, dan dinas terkait. Melalui survei ini pula diharapkan tekanan saat menghadapi pembelajaran, memikirkan prestasi, kesejahteraan, nilai, administrasi, hingga hubungan interaksi Pendidikan yang kurang baik dapat teratasi demi terwujudnya tagline merdeka belajar yang digagas oleh Kemendikbud seiring dengan diberlakukannya Asesmen Nasional.

2.6.3 Tujuan dan manfaat Asesmen Nasional

Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan Pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan Pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif peserta didik, tetapi juga memotret hasil belajar sosial emosional. Di sisi lain juga dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, sehingga hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Untuk itu,

diperlukan formulasi tujuan yang nantinya hendak dicapai, salah satunya adalah menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah yakni pengembangan kompetensi dan karakter.

Pada referensi lain juga menyebutkan tujuan-tujuan lain yakni:

- 1) Mendorong guru mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik secara utuh. Guru harus lebih aktif menggali dan mengembangkan karakter peserta didik.
- 2) Menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Diharapkan guru tidak hanya mentransfer materi pembelajaran saja akan tetapi juga menerangkan secara mudah dan komunikatif tentang poin-poin penting dari tujuan utama sekolah.
- 3) Memberi gambaran tentang karakteristik esensial sekolah/madrasah yang efektif dalam menggapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Disini guru harus mampu memilih cara yang tepat sasaran agar tujuan asesmen tercapai.

Asesmen Nasional juga memberi deskripsi mengenai ciri khas esensi sebuah sekolah/madrasah yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan utama. Hal ini diharapkan mampu mendorong pihak Lembaga penyelenggara pendidik dan dinas terkait untuk memfokuskan diri pada sumber daya pada perbaikan kualitas Pendidikan. Hal ini berkaitan dengan hasil asesmen sendiri yang diharapkan

mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Manfaat dari pelaksanaan Asesmen Nasional ini apabila di rinci adalah sebagai berikut:

- a) Asesmen nasional merupakan potret kualitas pembelajaran disekolah/madrasah di daerah,
- b) Asesmen nasional sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah/madrasah di daerah
- c) Sebagai landasan menyusun program-program peningkatan kualitas pembelajaran disekolah/madrasah.

2.6.4 Pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2022

Berdasarkan surat Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Nomor: 013/H/PG.00/2022, Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2022 pada tanggal 24 Maret 2022, bahwa jadwal pelaksanaan Asesmen sebagai berikut:

1. Survei Lingkungan Belajar Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik tingkat Sekolah Dasar

Tabel. 2.3
Jadwal Pelaksanaan Pengisian Survei Lingkungan Belajar

No	Tanggal	Kegiatan
1	19 Agustus 2022	Penarikan Data Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik dari dapodik untuk Peserta Survei Lingkungan Belajar jenjang SD/MI/Paket A PKPPS – Ula
2	Mulai 20 Agustus 2022	Pencetakan Kartu Login Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik dari dapodik untuk peserta survei Lingkungan Belajar Jenjang SD/MI/Paket A PKPPS – Ula
3	22 – 31 Agustus 2022	Pengisian Survei Lingkungan Belajar Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik jenjang SD/MI/Paket A PKPPS – Ula Secara Mandiri.

2. Pelaksanaan Asesmen Nasional Untuk Peserta Didik Tingkat Sekolah Dasar.

Tabel 2.4
Jadwal Pelaksanaan Asesmen Nasional

No	Hari	Tanggal	Kegiatan
1	Jumat - Minggu	23 sept– 25 Sept 2022	Sinkronisasi Simulasi AN Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang I
2	Senin – Kamis	26 sept – 29 Sept 2022	Simulasi AN jenjang SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang I
3	Jumat - Minggu	30 Sept – 2 Oktober 2022	Sinkronisasi Simulasi AN jenjang SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang II
4	Senin - Kamis	3 Oktober – 6 Oktober 2022	Simulasi AN jenjang SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang II
5	Jumat - Minggu	14 Oktober – 16 Oktober 2022	Sinkronisasi Gladi Bersih AN Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A
6	Senin - Kamis	17 – 20 Oktober 2022	Gladi Bersih AN Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A
7	Senin - Kamis	21 Oktober – 23 Oktober 2022	Sinkronisasi AN Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang I
8	Senin - Kamis	24 Oktober – 27 Oktober 2022	Pelaksanaan AN Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang I
9	Jumat - Minggu	28 Oktober – 30 Oktober 2022	Sinkronisasi AN Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A Gelombang II
10	Sabtu - Minggu	31 Oktober – 3 November 2022	Pelaksanaan AN Jenjang SD/MI/SDLB/Paket gelombang II

3. Jadwal Pelaksanaan Asesmen Peserta Didik Nasional Tahun 2022

Tabel 2.5
Jadwal SD,MI, SDLB, dan yang sederajat Gelombang I

Hari/Tanggal	Sesi	Waktu	Jenis Asesmen	Pelaksanaan
Senin – Kamis / 24 – 27 Oktober 2022	1	07.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Latihan (15 menit) • Literasi Membaca (75 menit) • Survei Karakter (30 Menit) 	Hari ke - I
	2	10.30 – 12.30		
	3	13.30 – 15.30		
Senin – Kamis / 24 – 27 Oktober 2022	1	07.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Latihan (15 menit) • Literasi Membaca (75 menit) • Survei Karakter (30 Menit) 	Hari ke II
	2	10.30 – 12.30		
	3	13.30 – 15.30		

Tabel 2.6
Jadwal SD, MI, SDLB dan yang sederajat Gelombang II

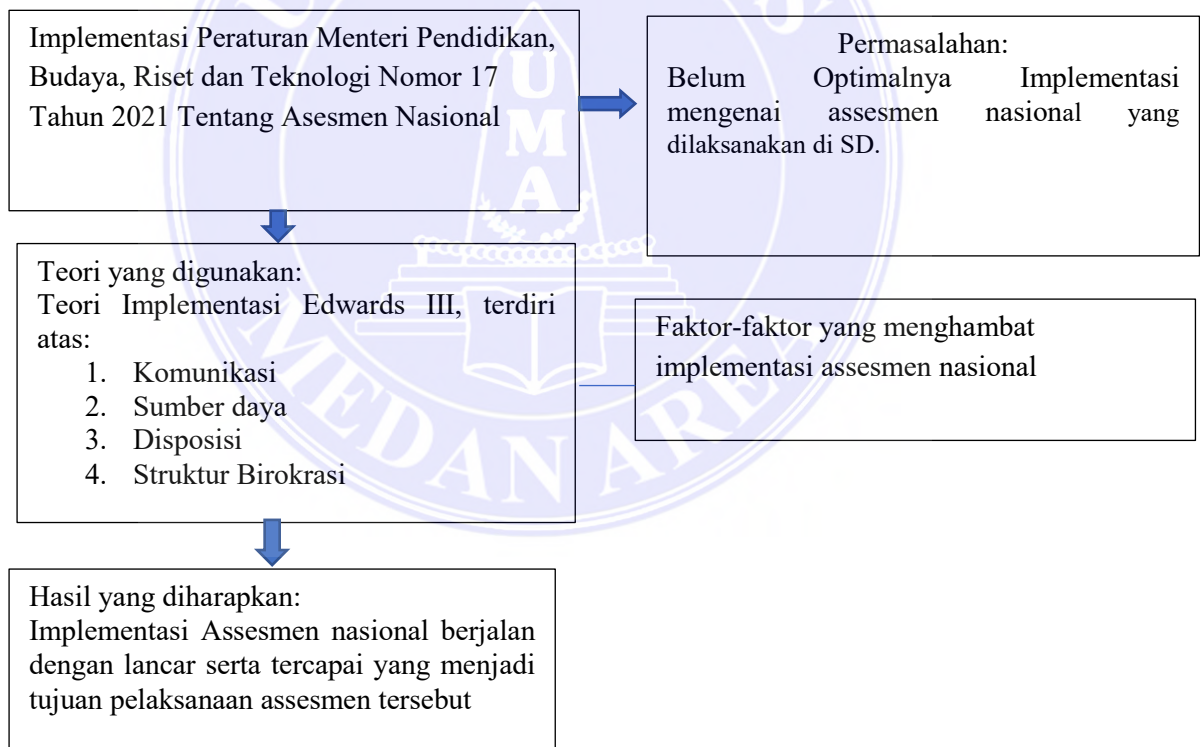
Hari / Tanggal	Sesi	Waktu	Jenis Asesmen	Pelaksanaan
Senin – Kamis / 31 Oktober – 3 November 2022	1	07.30 – 09.30	<ul style="list-style-type: none"> • Latihan (15 Menit) • Literasi Membaca (75 Menit) • Survei Karakter (30 Menit) 	Hari Ke II
	2	10.30 – 12.30		
	3	13.30 – 15.30		
	1	07.30 – 09.40	<ul style="list-style-type: none"> • Latihan (15 Menit) • Literasi Membaca (75 Menit) • Survei Karakter (30 Menit) 	Hari ke II
	2	10.40 – 12.50		
	3	13.50 – 16.00		

2.7 Kerangka Pikir

Menurut Purnomo dkk (dalam Nurdin & Hartati, 2019), kerangka pikir menjelaskan gejala sementara dari objek permasalahan penelitian. Keimigrasian merupakan segala hal berkaitan dengan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia berikut pengawasannya demi keutuhan kedaulatan negara. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen

Nasional di SDN 12 Rantau Selatan. Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk meningkatkan mutu Pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan Pendidikan. Dalam pelaksanaan Asesmen Nasional dilapangan banyak terjadi kendala sehingga proses pelaksanaannya belum optimal maka diperlukan solusi yang mampu mengatasinya.

Kerangka pikir didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian, kerangka pikir tersebut dapat di gambarkan dengan gambar bagan sebagai berikut



Gambar 2.2 : Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 12 Rantau Selatan, Jln. H. Iwan Maksu, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Jln Menara No 07 Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara. Waktu Penelitian dilakukan Bulan Oktober – Desember 2022.

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah Informan kunci yaitu 1 (satu) orang kepala seksi kurikulum dan penilaian SD, Informan Utama yaitu 1 (satu) orang tenaga pendidik dan 1(satu) orang kepala satuan pendidikan, Informan tambahan yaitu peserta didik kelas V di SDN 1 Rantau Selatan T.P 2022/2023 terdiri dari 7 (tujuh) orang peserta didik, 1 (satu) orang pendidik kelas V. Informan penelitian ini berjumlah 11 (sebelas) orang.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan dan mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Menteri pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah study kasus, yang merupakan bagian dari metode kualitatif

yang dilakukan karena adanya ketertarikan atau kepedulian pada suatu kasus tertentu. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, Lembaga, atau gejala tertentu. Secara lebih mendalam dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu:

1. Data primer dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara kepada Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik, Panitia Asesmen Nasional, dan peserta didik serta dokumentasi di SDN 12 Rantau Selatan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kepala Satuan, pendidik di SDN 12 Rantau Selatan dan berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut. Adapun dokumen seperti Profil Sekolah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Observasi Partisipan Pasif

Observasi Partisipan Pasif (*Passive Participation*) “ *Means that research is present at the scene of action but does not interact or participate*” dalam observasi ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. jadi observasi merupakan penyelidikan yang di lakukan secara sistematis yang

melibatkan indra penglihatan dan pengamatan langsung terhadap fenomena yang di teliti sehingga dapat dianalisa setelah kejadian berlalu. Penelitian menggunakan observasi partisipan pasif yang mana peneliti melakukan penelitian menggali data secara langsung pelaksanaan Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ditujukan kepada kepala satuan Pendidikan, panitia asesmen, pendidik, dan peserta didik di SDN 12 Rantau Selatan. Wawancara ini untuk mengetahui pelaksanaan Asesmen Nasional.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data yang mendukung, berupa laporan-laporan, catatan yang dimiliki pendidik, dan foto-foto selama pelaksanaan Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan. Dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui proses pelaksanaan Asesmen Nasional, permasalahan yang terjadi dan upaya untuk mengatasi permasalahan selama pelaksanaan Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, penjabaran ke dalam sejumlah unit, pembuatan sintesa, penyusunan pola, pemilihan bagian yang penting dan yang akan di pelajari, dan penarikan kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain

(Hardani dkk, 2020). Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah model analisis data Miles, Huberman dan Saldana (Miles et al. 2014: 12-14; Hardani dkk, 2020: 163-164) sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data (Data Collection) Ketika arah penelitian sudah ditetapkan dan sumber data sudah ditentukan, maka dilakukan pengumpulan data untuk mendapatkan segala data dan informasi yang diperlukan untuk meraih tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan harus sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Pengumpulan data dilakukan dengan strategi atau metode tertentu yang mempermudah pemerolehan data, baik itu survei, kuesioner, perangkat tes, grup fokus, observasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Data penelitian yang diperoleh dapat berupa teks, huruf, suara, angka, bahasa, simbol, foto, kondisi, gambar dan lainnya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sesuai fokus kajian yakni Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan.
2. Reduksi Data (Data Reduction) Reduksi data adalah proses penyeleksian, penyederhanaan dan pentransformasian data yang diperoleh dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, maupun bahan empiris lainnya selama proses penggalian data di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang bertujuan untuk memfokuskan, menajamkan, menyortir, merangkum, dan mengolah data dengan sedemikian rupa serta membuang atau menyisihkan hal-hal yang tidak perlu sampai akhirnya dapat ditarik

sejumlah kesimpulan. Reduksi data dianggap sebagai perampingan data untuk memperoleh data yang benar dan sesuai seperti yang dijelaskan oleh Miles et al bahwa reduksi dapat menajamkan data yang ada. Data dalam penelitian adalah data yang kompleks dan tidak semuanya dari data tersebut berkenaan dengan penelitian. Reduksi data menyederhanakan data yang digali di lapangan dan menyisakan hal yang penting dan berkaitan saja dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dan reduksi data secara bersamaan dengan memilih, menseleksi dan menyaring data primer yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

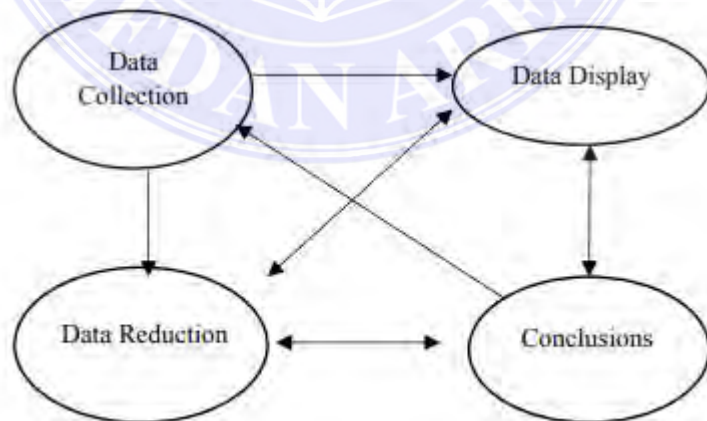
3. Penyajian Data (Data Display) Penyajian data adalah penyajian sejumlah informasi terorganisir yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan tindakan. Setelah data dikondensasi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan/bagian-bagian tertentu dari hasil kondensasi, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Miles dan Huberman mengatakan, penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah gambaran seluruh informasi tentang bagaimana selama pelaksanaan Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau selatan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Drawing and Verifying Conclusions)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi menjadi tahap akhir proses analisis data, yang mana peneliti menafsirkan data dan hasil analisis lalu menjabarkan kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian merupakan intisari dari temuan peneliti yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang sesuai dengan uraian-uraian sebelumnya, atau bisa berupa keputusan berdasarkan metode berfikir induktif dan deduktif. Dengan melihat sebuah kesimpulan dalam penelitian kualitatif memungkinkan menjawab seluruh permasalahan yang terdapat di rumusan masalah.

Adapun model analisis data interaktif Miles, Huberman dan Saldana digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1. Analisis Data Model Miles, Huberman & Saldana (2014)



3.7 Pemeriksa Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data ini merupakan kegiatan yang penting bagi peneliti untuk menjamin dan menyakinkan pihak lain tentang kebenaran dan hasil penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik sebagai berikut, yaitu:

1. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat merupakan kegiatan dengan maksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketentuan pengamat dibuat secara terstruktur dilakukan secara serius dan berkesinambungan terhadap pengamatan yang realistis di lokasi penelitian. Maka dalam hal ini peneliti diharapkan mampu menguraikan proses bagaimana penemuan tersebut dilakukan.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan proses pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai sumber dan Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut, dengan triangulasi, peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori.

Pada penelitian ini menggunakan jenis triangulasi Teknik yang mana peneliti menggali informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data, seperti wawancara kepada beberapa sumber yang dapat membantu dalam

memberikan penafsiran pada penelitian ini, dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, gambar atau foto.

3.8 Definisi Konseptual dan Operasional

3.8.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Definisi konseptual penelitian ini adalah:

- a. Implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Implementasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.
- b. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan *output* pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.

3.8.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan tentang hal-hal yang diperlukan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Definisi operasional penelitian ini ialah sebagai berikut.

- a. Komunikasi, yakni interaksi berkesinambungan yang dilakukan di dalam maupun luar organisasi untuk menyebarkan informasi dan menyelaraskan

pemahaman para pelaksana tentang tujuan, maksud, dan sasaran dalam implementasi kebijakan. Dengan komunikasi, pelaksana dan para pemangku kepentingan dapat mengetahui informasi dan isi kebijakan yang hendak diterapkan.

Tiga hal utama dalam aspek komunikasi ialah:

1. Transmisi, penyampaian informasi secara merata kepada para pelaksana dan pemangku kepentingan agar semua pihak mengetahui kebijakan yang di implementasikan.
 2. Kejelasan, yakni kejelasan, kebenaran dan kesesuaian informasi tentang implementasi kebijakan yang diberikan kepada pelaksana dan para pemangku kepentingan sehingga para aktor terlibat dapat dengan jelas memahami apa yang harus dan tidak harus dilakukan sesuai dengan perannya masing-masing.
 3. Konsistensi, yakni ketegasan dan konsistensi penyampaian informasi implementasi kebijakan. Konsistensi menyeragamkan pemahaman pelaksana dan pemangku kepentingan dan meminimalisir ambiguitas atau kerancuan.
- b. Sumber daya, yakni segala sesuatu yang diperlukan agar program atau aktivitas implementasi kebijakan dapat terealisasi dan berdampak seperti apa yang diharapkan. Sumber daya implementasi kebijakan melingkupi sumber daya manusia, informasi, dana, otoritas dan fasilitas.
- c. Disposisi, ialah karakteristik dan perilaku pelaksana atau aktor kebijakan. Disposisi memengaruhi cara bersikap dan pemahaman pelaksana dan para

pemangku kepentingan akan tujuan implementasi kebijakan. Apabila pelaksana pro kebijakan, maka implementasi kebijakan kemungkinan tidak menghadapi terlalu banyak hambatan. Namun, jika pelaksana tidak sependapat dengan pembuat kebijakan atau menolak kebijakan, maka implementasi akan agak lebih sulit akibat kecenderungan rentan konflik atau pertentangan.

- d. Struktur birokrasi berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan yang lazimnya dilaksanakan oleh organisasi pemerintah berbentuk birokrasi. Organisasi birokrasi memiliki struktur berlapis dengan kerangka kerja berbentuk piramida, yang jalinan komando dijalankan dari atas ke bawah dan terdapat pembagian tugas, fungsi, serta wewenang secara jelas dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan:

1. Implementasi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sudah berjalan namun belum optimal, dikarenakan masih ada terhambatnya pada indikator Teori Edward III yakni komunikasi dan sumber daya. Hal ini dikarenakan masih ada peserta didik yang belum menerima informasi mengenai Asesmen Nasional, belum ada informasi yang disampaikan pihak sekolah kepada Masyarakat terkhusus orangtua peserta didik, belum ada informasi yang diberikan kepada peserta didik agar belajar untuk menghadapi Asesmen Nasional. Sumber daya yang ada pada SDN 12 Rantau Selatan masih kurang memadai, dikarenakan pada saat pelaksanaan berlangsung wifi atau internet masih kurang kuat untuk dikoneksikan ke cromebook, masih ada peserta didik yang kurang paham dalam penggunaan cromebook, kurangnya sumber daya manusia seperti guru khusus komputer untuk pembelajaran computer, dan pada saat pelaksanaan asesmen nasional berlangsung yang berhak memandu untuk memberikan pemahaman mengenai Asesmen Nasional adalah pengawas, namun di lapangan

yang memandu peserta didik adalah guru atau pendidik di SDN 12 Rantau Selatan.

2. Faktor penghambat terlaksananya asesmen nasional dibagian sumber daya finansial sehingga kepala satuan pendidikan melakukan kebijakan dengan mengajukan anggaran pembangunan ruang laboratorium dan menambah Mbps jaringan Wifi.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas dan sesuai hasil penelitian yang diperoleh, maka kepada kepala satuan Pendidikan di SDN 12 Rantau Selatan agar melakukan pelatihan kepada peserta didik supaya meningkatkan pemahaman mengenai pertanyaan yang ada di asesmen nasional. selain itu juga dapat memfasilitasi ruangan laboratorium komputer agar peserta didik bisa belajar komputer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrochim, Deni, Dkk. (2021). Analisis Kesiapan Peserta Didik dan Guru pada Asesmen Nasional (Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar). *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*. Maret, Vol.4, No.1
- Ambar Sri Lestari (2020). *Narasi dan literasi media dalam pemahaman Gerakan radikalisme konsep dan analisis*, Depok: PT.Rajagrafindo persada, Hlm 59.
- Alfari Sabrina. (2020) “ *Contoh Soal AKM Numerasi dan Literasi di Asesmen Nasional*”.
- E. Mulyasa, (2013). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Akasara. Hal.36
- Endang Widi Winarni, Teori dan praktik penelitian kuantitatif,kualitaitaif,penelitian tindakan kelas ptk,Researsch and development r dan d, Jakarta : bumi aksara 2018 Hlm 160.
- Hardani, dkk.(2020).*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* . Yogyakarta: Pustaka Ilmu. hlm. 161
- Haedar, A (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca Universitas Peparari Makassar*, Vol.1
- Higgins, S. (2014). Critical Thinking For 21 St-Century Education: A Cyber-tooth Curriculum, *Journal Springer*, 44:559-574
- H. Pulzl dan O. Treib. (2007). *Implementing Public Policy: Hand Book of Public Policy Analysis, Theory, Politics, and Methods*, New York: CRC Press Taylor & Francis Group, hlm. 89
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005. hlm. 248.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asesmen Nasional. (2021). Lembar Tanya Jawab. Jakarta: Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Halaman 128.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *AKM dan Implementasinya pada Pembelajaran*. Jakarta: Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Lexy J Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja Rosdakarya, hlm 329.
- Lidya Amalia Rahma. (2021). *Optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah dalam Persiapan Asesmen Nasional*. Maret, Vol 4, No. 1, Halaman 128.
- Merile S. Grindle. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Jakarta.2002. Hal.21
- Muh. Fitrah & Luthfiah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*, Sukabumi: CV Jejak, 2017, hlm 208.
- Nanda Novita, dkk. (2021). *Asesmen Nasional: Pengetahuan dan Presepsi Calon Guru*. Jurnal Ilmu Sosial dan Kependidikan. Januari, Vol.5, No.1, Halaman 127.
- Nicolas Jonas. (2018) ”*Numeracy Practices and Numeracy Skills Among Adults*”, OECD EducationkWorking Paper, No. 177
- Ridwan Abdullah Sani, (2021). *Pembelajaran Berorientasi AKM*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 8
- Riant Nugroho (2012), *Public Policy*, Jakarta: Gramedia, hlm. 191.
- Sagala S. (2012). *Supervisi Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Samekto, F. X. A. (2021, Februari 5). *Tentang Profil Pelajar Pancasila*. Kompas.id.
- Suhaarsimi arikunti, *prosedur suatu pendekatan praktek*, Jakarta:rineka cipta.2002. hlm 128.
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta
- Syaril & Zen Zelhendri.(2017).*Dasar - Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Kencana Word Bank, “Janji Pendidikan di Indonesia, (New York: Worl Bank, 2020), hlm.21

Lampiran 1

Tabel pertanyaan responden

No	Informan	Tema Pertanyaan
1	Kepala Satuan Pendidikan SDN 12 Rantau Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak melakukan sosialisasi mengenai Asesmen Nasional kepada pendidik, peserta didik, dan masyarakat ? 2. Selama pelaksanaan Asesmen Nasional apakah sekolah yang bapak pimpin memiliki kendala ? dan bagaimana solusi yang bapak berikan untuk mengatasi kendala tersebut! 3. Siapakah peserta Asesmen di Sekolah yang bapak pimpin ? apakah mereka mengikuti Asesmen Nasional ? 4. Bagaimana pelaksanaan Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan yang bapak pimpin?
2	Pendidik kelas V SDN 12 Rantau Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ibu sudah mensosialisasikan Asesmen Nasional kepada peserta didik dan masyarakat ? 2. Masih ada peserta didik yang tidak bisa mengoperasikan komputer ? 3. Apakah ibu mengikuti assesmen nasional ? 4. Bagaimana pelaksanaan Asesmen Nasional di sekolah ibu ?
3	Peserta Didik Kelas V yang mengikuti Asesmen Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada sosialisasi yang diberikan oleh sekolah maupun guru kepada anda ? kapan ? 2. Apakah anda paham cara menggunakan <i>cromebook</i> ? 3. Apakah ada persiapan yang anda lakukan untuk menghadapi assesmen nasional? 4. Apakah waktu yang diberikan cukup untuk menjawab semua pertanyaan assesmen nasional?

4	Tim Teknis Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masih ada pendidik dan peserta didik yang tidak mengikuti Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan ? 2. Apakah sumber daya yang ada di SDN 12 Rantau selatan sudah mendukung pelaksanaan AN ? 3. Pada saat pelaksanaan Asesmen Nasional, apakah masih ada peserta Asesmen yang dibantu ? 4. Apa saja tugas bapak sebagai teknisi Asesmen Nasional ?
5	Tim Asesmen Nasional tingkat Kabupaten Labuhanbatu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ibu melakukan sosialisasi mengenai Asesmen Nasional kepada Kepala Satuan Pendidikan ? 2. Kendala apa yang saja yang dialami saat Pelaksanaan Asesmen Nasional berlangsung ? jika ada apa solusi yang bapak/ibu berikan? 3. Apakah ada satuan pendidikan yang tidak mengikuti Asesmen Nasional ? 4. Apakah anda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan yang mengikuti assesmen nasional?

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1: Ibu Masdalena Hasibuan, S.E selaku Kepala Seksi Kurikulum & Penilaian SD dan Tim Asesmen Nasional melakukan Monitoring dan Evaluasi ke Satuan Pendidikan.



Gambar 2: Monitoring ke Satuan Pendidikan Oleh Pihak Dinas Pendidikan Provinsi



Gambar 3: Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Masdalena Hasibuan, S.E selaku Kepala Seksi Kurikulum & Penilaian SD dan Tim Asesmen Nasional



Gambar 4: Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Bachri Ritonga, S.Pd selaku Kepala Satuan Pendidikan SDN 12 Rantau Selatan



Gambar 5: Peneliti melakukan wawancara kepada Umar Tri Harminto, Amd selaku Teknisi Asesmen Nasional di SDN 12 Rantau Selatan



Gambar 6 : Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Eka Elisda, S.Pd selaku Pendidik Kelas V yang mengikuti asesmen nasional



Gambar 7: Peserta didik kelas V yang mengikuti Asesmen Nasional



Gambar 8 : Peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang peserta didik yang mengikuti asesmen nasional



Gambar 9: Peneliti melakukan wawancara kepada peserta didik.